

PERAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENCAPAIAN SDGs DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS: BAZNAS KOTA YOGYAKARTA)

Yuni Septi Nurhayati dan Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

yuniseptinurhayati@gmail.com

masudi_moh@umy.ac.id

Abstrak

Kemiskinan adalah keadaan yang terjadi dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Hal ini merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan. Berangkat dari berbagai isu ekonomi dan kesejahteraan, maka negara-negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengesahkan 17 goals untuk memberantas permasalahan ekonomi dan kesejahteraan dengan agenda SDGs (Sustainable Development Goals). Dalam mewujudkan agenda SDGs ini, pemerintah Indonesia menggandeng partisipan melalui empat *platform* yang salah satunya adalah lembaga filantropi dengan menggunakan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari wawancara dan data sekunder yang didapatkan dari dokumentasi-dokumentasi serta laporan-laporan yang sudah tersedia. Teknik pengambilan sampel disini menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini adalah peran zakat produktif sangat berpengaruh bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan fakta lapangan yang penulis temui dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staff-staff pelaksana bidang *pentasharufan* dan *mustahiq* zakat produktif di Baznas Kota Yogyakarta. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi produktif dalam program Jogja Sejahtera di tiga bidang usaha mazakki ini juga dibuktikan dengan keberhasilan seorang *mustahiq* yang sudah bisa dan mampu untuk berqurban pada Idul Adha tahun 2018 ini.

Kata Kunci : Zakat Produktif, SDGs (Sustainable Development Goals), Kemiskinan.

Abstract

Poverty is a situation that occurs with an inability to meet basic needs such as shelter, food, education and health. This is one of the causes of economic problems due to weak sources of income. Stemming from various economic issues and welfare, the UN (United Nation) states endorsed 17 goals to eradicate economic and welfare problems with the SDGs agenda. In realizing this SDGs agenda, the Indonesian government cooperates with participants through four platforms, one of which is a philanthropic institution using zakat as an instrument of poverty alleviation.

This study aims to analyze the role of zakat productive in poverty alleviation. The data used in this study are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from the documentation and reports that are already available. The sampling technique in this study used purposive sampling. The result of this study is the role of zakat productive is very influential for the welfare of society life. This is evidenced by the fact that the author met and based on the result of the interview. The success of productive economic empowerment in the Jogja Sejahtera program in three parts of mazakki's business is also evidenced by the success of a mustahiq who is able to carry out qurban on Idul Adha in 2018.

Keywords: Zakat Productive, SDGs (Sustainable Development Goals), Poverty.

PENDAHULUAN

Berakhirnya tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015, *United Nation* atau PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melakukan sidang umum pada tanggal 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Sidang yang dihadiri oleh negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa itu dengan resmi mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai kesepakatan pembangunan global. Program perencanaan pembangunan itu disusun dalam dokumen "*Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development Goals*". Dokumen ini berisi 17 sasaran dan 169 target pembangunan untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang (Hoelman *et al*, 2015: 8).

Salah satu dari ketujuh belas sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah *no poverty* yaitu tanpa kemiskinan. Sasaran pertama inilah yang penulis ambil untuk diteliti dan diuji. Pasalnya, persoalan kemiskinan adalah persoalan krusial yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia ini, apalagi dengan terus meningkatnya jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk), jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan 6.900 orang dari September 2016 ke Maret 2017 (Destrianita, 2017: www.tempo.co).

Sebuah laporan baru menunjukkan, sebagian besar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di kawasan Asia hidup di Indonesia dan Filipina. Laporan dari "*Asean-China-UNDP Report on Financing the Sustainable Development Goals (SDGs) in*

ASEAN” tersebut bertujuan untuk melacak kemajuan pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Laporan tersebut menunjukkan, pada intinya 10 negara ASEAN telah membuat kemajuan signifikan dalam urusan pemberantasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Meski begitu, dari laporan terbaru menyebutkan sekitar 36 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, 90 persennya berada di Indonesia dan Filipina. Salah satu indikator kemiskinannya adalah mereka yang berpenghasilan rendah, sekitar US\$1,90 atau setara dengan Rp 25 ribu per hari (Budi, 2017: m.liputan6.com).

Selanjutnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 masih mencapai 488.830 ribu jiwa dengan garis kemiskinan 360.169 (berdasarkan data BPS DI Yogyakarta). Hal ini berarti masih ada 488.830 ribu orang miskin di DI Yogyakarta dengan penghasilan di bawah Rp. 360.169 per kapita per bulan. Mengantisipasi kemiskinan yang terjadi, DPRD DI Yogyakarta meminta Pemda DI Yogyakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengentasan kemiskinan.

Salah satu program pengentasan kemiskinan tersebut adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang nilainya Rp 40 miliar. Namun, pelaksanaan tersebut tidak tepat sasaran. Program tersebut justru hanya dimaknai pembagian uang Rp 1 juta oleh pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota.

Irfan Syauqi Beik menyebutkan bahwa pada tahun 2008 untuk mengantisipasi dampak perekonomian yang antara lain berdampak pada kenaikan harga minyak dan pangan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan, salah satunya adalah paket Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, kebijakan BLT tersebut seringkali tidak efektif akibat koordinasi dan manajemen yang kurang baik. Untuk itu, diperlukan adanya sejumlah instrumen alternatif yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat, infak dan sedekah (Beik, 2009: 1).

Dipilihnya lembaga zakat sebagai objek penelitian karena ia dibangun dengan menggunakan modal yang dikumpulkan dari para *muzakki*, yang modalnya merupakan milik orang-orang miskin dan diupayakan semaksimal mungkin untuk memerangi kemiskinan. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia yang kemudian akan memiliki potensi zakat terbesar pula. Berdasarkan

sensus penduduk 2010, jumlah muslim mencapai 87,18% dari sekitar 242,5 juta jiwa penduduk Indonesia. Lebih dari 50% atau sekitar kurang lebih 121,25 juta jiwa muslim Indonesia dapat diasumsikan termasuk ke dalam kelas menengah yang dalam konteks ini mereka adalah *muzakki* (BPS, 2010: bps.go.id).

Fakta tersebut diperkuat dengan data penelitian dari Baznas Indonesia pada 2016 potensi zakat mencapai 286 triliun. Dilansir dari Harian Republika, ketua Baznas Bambang Sudibyo, mengatakan “setiap tahunnya pengumpulan zakat terus mengalami peningkatan. Pada 2010, zakat yang diperoleh sekitar 217 triliun dan terus mengalami peningkatan di 2016 yang menyentuh angka 286 triliun”. Selanjutnya, beliau menerangkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga syariah terbesar, ormas-ormas keagamaan di Indonesia juga luar biasa besarnya (Intan, 2017: Harian Republika).

Jika melihat perkembangan pembangunan ZIS di Indonesia, maka sejak dekade 1990 telah berdiri berbagai macam lembaga pengelola zakat yang berusaha mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern dalam prakteknya (Beik, 2009: 2). Di antara lembaga ZIS, BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS juga merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri akan lebih relevan dengan SDGs karena langsung di bawah naungan pemerintah. Oleh sebab itu, penulis mengambil BAZNAS sebagai objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan sumber penelitian yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat melalui metode survey dan wawancara langsung dengan responden/sampel penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara literatur seperti data-data dokumentasi, laporan keuangan, laporan tahunan, dll.

Penelitian ini dilaksanakan di Baznas Kota Yogyakarta dengan sampel staff pelaksana bidang *pentasharufan* dan *mustahiq* zakat produktif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Sugiono, 2015: 85).

Pertimbangan tertentu ini adalah orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dengan jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semiterstruktur. Dalam wawancara semi terstruktur, pertanyaan yang diberikan kepada informan sudah disiapkan sebelumnya dan dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara semiterstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan dan jawaban secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Sehingga dalam metode wawancara semiterstruktur ini perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Selanjutnya, untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Pertama, reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kedua, penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Namun penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif merupakan cara yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Ketiga, Pada tahap ini kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan awal yang dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2015: 252).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baznas merupakan Badan Amil Zakat (BAZ) yang mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dalam menjalankan kegiatannya. Salah satu bentuk nyata Baznas dalam menjalankan Undang-undang tersebut adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pendistribusian zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan adalah dengan zakat produktif.

Tabel 4.1
Pentasharufan periode 2014 s/d 2017

Program	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Jogja Taqwa	2.327.583.250	2.717.947.159	2.893.960.315	2.596.535.500
Jogja Cerdas	768.420.000	648.120.800	440.608.300	839.539.400
Jogja Sehat	77.029.375	84.390.000	10.300.000	384.250.000
Jogja Sejahtera	207.650.000	266.550.000	399.995.750	440.000.000
Jogja Peduli	140.540.000	14.640.000	255.714.750	966.873.765
Hak Amil dan Operasiona l	186.502.375	132.224.114	300.500.388	417.473.935
Jumlah	3.707.725.000	3.863.872.073	4.301.079.503	5.644.672.600

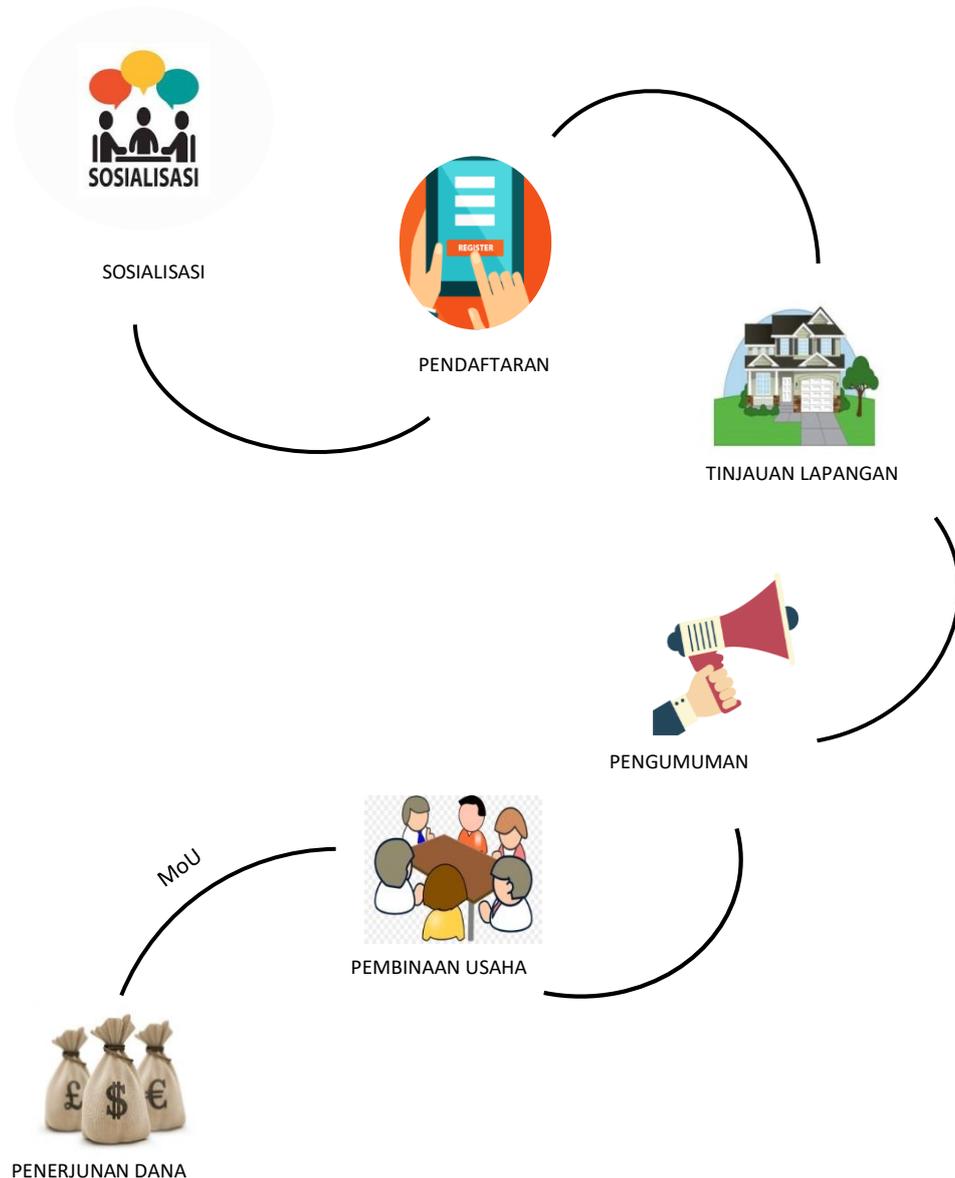
Berdasarkan tabel 4.1, *pentasharufan* atau pendistribusian zakat produktif dalam program Jogja Sejahtera pada tahun 2017 adalah 440.000.000 dengan hasil himpunan dana keseluruhan pada tahun 2017 adalah 5.756.104.023 rupiah. Himpunan dana ini berasal dari berbagai sumber di antaranya adalah dari zakat, infak dan sedekah perorangan yang membayar kewajiban zakat serta sedekah secara sukarela, zakat profesi dari para pegawai dan PNS (Pegawai Negeri Sipil), dana-dana sosial CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan, dan lain-lain termasuk sedekah *mustahiq S2* (sedino sewu) yang di kumpulkan setiap satu bulan sekali pada saat pendampingan.

Dalam pendistribusiannya, ada program-program yang dibuat untuk menyalurkan dana zakat produktif supaya menjadi modal usaha yang berkelanjutan. Program unggulan

yang dimiliki oleh Baznas Kota Yogyakarta pada tahun 2017 terdapat lima program yang salah satu programnya adalah Yogya Sejahtera. Yogya Sejahtera adalah pendistribusian zakat untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa, difabel, ustadz, penyuluh, penjaga masjid dan *muallaf* kurang mampu (baznas.jogjakota.co.id). Program Yogya Sejahtera dalam pemberdayaan ekonomi produktif ini memiliki tiga produk usaha yaitu mazakki go (gorengan), mazakki cell (konter) dan angkringan mazakki.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 11 Mei 2018, penulis merangkum tahap-tahap pemberian modal usaha yang dilakukan Baznas Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Alur Pemberian Modal Zakat Produktif



Melihat dari pengertian, zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan usaha. Maka dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerima/*mustahiqnya* menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Hal tersebut bisa berupa kerajinan tangan, makanan olahan, pakaian atau benda-benda lain yang terus berputar dan diperjual belikan. Oleh karena itu pemberian zakat produktif lebih efektif dari pemberian zakat konsumtif untuk membantu *mustahiq* keluar dari garis kemiskinan dan ketergantungan dari bantuan oron lain.

Tabel 4.3
Data Kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2017

Variabel Kemiskinan	Tahun
	2017
Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta	329.506
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	423.815
Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)	32,20
Persentase Penduduk Miskin	7,64

Berdasarkan tabel 4.2, jumlah penduduk yang termasuk kategori miskin di Kota Yogyakarta masih 32.020 jiwa dari jumlah penduduk Kota Yogyakarta 329.506 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 423.815 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan masih ada masyarakat sebanyak 32.020 jiwa yang pendapatannya di bawah Rp. 423.815 per bulan. Salah satu teori pembangunan yang dikenalkan oleh Baricloche Foundation di Argentina adalah *The Basic Need Aproach* (Pendekatan Kebutuhan Pokok). Menurut kelompok ini, kebutuhan pokok tidak mungkin dapat dipenuhi jika mereka masih berada di bawah garis kemiskinan serta tidak mempunyai pekerjaan untuk mendapatkan yang lebih baik (Syaiful dan Suwarno, 2015: 152). Maka pemberdayaan ekonomi umat sangat penting untuk membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan.

Pada dasarnya masalah kemiskinan adalah tanggung jawab pemerintah, namun program pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya bantuan elemen-elemen masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikeluarkan pada 4 Juli 2017 silam. Peraturan Presiden tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui empat platform partisipasi yaitu pemerintahan dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, serta akademisi dan pakar.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Muhaimin (koordinator bidang *pentasharufan*) yang menyatakan bahwa:

“Secara aturan, memang yang berkewajiban untuk mengentaskan kemiskinan itu pemerintah. Tetapi kami hanya pelengkap di pemerintahan. Pemerintah itu banyak sekali sebetulnya sudah melakukan berbagai program”.

Zakat dapat pula dijadikan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian. Terdapat tiga langkah untuk membangun sistem yang mampu mendukung pembangunan kemandirian ekonomi dengan zakat sebagai salah satu tiang utama (Rosmawati, 2014: 177). Strategi pertama adalah *free financing access*, pada sistem ekonomi syariah, mereka yang ingin berwirausaha akan disediakan akses dana secara luas tanpa jaminan bagi mereka yang tidak mampu. Hal ini berarti yang diciptakan adalah seorang *entrepreneur* bukan lapangan kerja.

Strategi kedua adalah menerapkan prinsip *profit loss sharing* atau kontrak bagi LKS (Lembaga Keuangan Syariah) secara baku dalam semua kegiatan perekonomian. Strategi ketiga adalah mengoptimalkan zakat sebagai *investment safety net*. Selanjutnya Rosmawati memaparkan dengan ketiga strategi tersebut dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka diperlukan kerja sama antara LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah). LKS yang berorientasi pada sektor riil akan akan berhasil dan berjalan dengan baik ketika mendapatkan dukungan dari BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagai penjamin dana kemitraan.

Keberhasilan pemberdayaan ekonomi produktif Baznas Kota Yogyakarta dalam program Jogja Sejahtera di tiga bidang usaha mazakki ini sangat berpengaruh besar bagi *mustahiq*. Seperti yang penulis dapatkan di lapangan, bahwa *mustahiq* sangat merasa terbantu dalam hal pendapatan dan produktifitas kerja. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Nina Riyanti (*mustahiq* mazakki Gorengan) yang mengatakan:

“Saya sebelumnya memang sudah jualan gorengan. Namun penjualannya saya titipkan di warung-warung makan dan angkringan. Setelah ada program bantuan ini, saya jadi bisa jualan sendiri. Program ini sangat berpengaruh sekali. Disamping itu usahanya bisa tambah maju karena kita difasilitasi gerobak dan peralatan yang lengkap.”

Pernyataan yang sama dipaparkan oleh Bapak Galih (*mustahiq* mazakki celluler) yang merasa terbantu dan pengaruh sekali program ini untuk dirinya. Beliau mengatakan:

“Program ini berpegaruh buat saya. Karena yang tadinya tidak punya angan-angan untuk berbisnis, jadi berbisnis. Bisa mengisi waktu produktif.”

Selanjutnya, *mustahiq* sangat merasa terbantu dari segi pendapatan. Walaupun banyak dari mereka yang menjadi karyawan swasta, namun belum tentu pendapatan mereka bisa menutupi kebutuhan hidup dengan jumlah anggota keluarga dan kebutuhan yang tidak sesuai dengan pendapatan. Maka dengan program ini para *mustahiq* kembali memaparkan kepuasan dan kebahagiaan atas berpengaruhnya zakat produktif dalam kehidupan mereka. Dengan sumringah Ibu Sri Suyati (*mustahiq* angkringan mazakki) mengatakan:

“Pendapatan saya bertambah karena dari angkringan ini. Semakin meningkat juga. Alhamdulillah bisa buat bayar listrik, keperluan di luar, bantu orang tua.”

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Nina Riyanti (*mustahiq* mazakki gorengan) yang mengatakan:

“Pendapatan meningkat. Karena produksi juga meningkat. Yang biasanya saya produksi dua kilo gorengan, sekarang bisa empat kilo produksi satu kali jualan”.

Keberhasilan peran zakat produktif ini sejalan dengan penelitian Yoghi Citra Pratama yang menyatakan dalam hasil penelitiannya dengan menggunakan uji *headcount ratio*. Hasilnya menunjukkan bahwa rasio jumlah orang miskin sebelum zakat dibagikan adalah sebesar 0,8 dan setelah zakat dibagikan, rasio ini kemudian mengalami penurunan menjadi 0,55. Artinya ada penurunan jumlah orang miskin dari 80 persen menjadi 55 persen. Dari beberapa data empirik yang dia sajikan, Yoghi menyimpulkan bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif (Pratama, 2015: 102).

Selanjutnya, pengaruh zakat produktif yang diberikan oleh Baznas Kota Yogyakarta juga dibuktikan dengan peningkatan ekonomi salah satu *mustahiq* yang sudah bisa

melaksanakan qurban pada Idul Adha tahun 2018 ini. Ibu Aminah (bagian Administrasi *pentasharufan*) menjelaskan:

“Salah satu *mustahiq* kami tahun ini ada yang melaksanakan qurban. Kami sangat bangga, senang dan sangat mengapresiasi usaha beliau sampai saat ini. Dari *mustahiq* hingga sekarang sudah bisa melaksanakan qurban.”

Secara umum, *mustahiq* itu ada miskin secara kerohaniannya atau religiusitasnya dan miskin secara materi. Dalam pemberdayaan ekonomi produktif ini, Baznas berharap bisa masuk ke duanya dan mengentaskan ke duanya. Maka dari itu, setiap pendampingan sekolah saudagar *mustahiq*, Baznas selalu mendatangkan tokoh agama agar bisa terus meningkatkan kualitas spiritual *mustahiq*. Namun hal ini berbeda dengan pernyataan Ibu Sri Suyati yang dalam hal spiritual merasa menurun. Ini dikarenakan ketika waktu shalat tiba, beliau masih disibukkan dengan memasak dan mempersiapkan beberapa menu untuk diujak di angkringannya. Ibu Sri Suyati (*mustahiq* angkringan mazakki) mengatakan:

“Untuk Ibadahnya, saya menjadi lambat. Karena ya kadang masih masak udah adzan. Badan masih kotor bau masakan. Kemudian kalo ada pengajian juga jadi berkurang untuk datang karena harus jaga angkringan. Karena saya semuanya sendiri. Mulai dari belanja, masak, mempersiapkan juga melayani pelanggan itu saya semua.”

Persoalan ibadah dan keagamaan tetap kembali kepada masing-masing individu dan menjadi kewajiban masing-masing individu. Penurunan ibadah yang dirasakan Ibu Sri Suyati (*mustahiq* angkringan mazakki) bertolak belakang dengan apa yang dirasakan Ibu Nina Riyanti (*mustahiq* mazakki gorengan) yang merasakan perubahan religiusitas lebih baik setelah bergabung dan menjadi penerima manfaat zakat produktif dalam program Jogja Sejahtera. Ibu Nina Riyanti (*mustahiq* mazakki gorengan) mengatakan:

“Kita sebelum pertemuan itu sholat dhuha dulu, diajarin. Alhamdulillah.”

Seluruh keberhasilan program Jogja Sejahtera yang membuat *mustahiq* sangat terbantu dan merubah kehidupan mereka khususnya dalam hal ekonomi, masukan dan saran untuk program yang lebih baik ke depannya tetap di sampaikan oleh semua *mustahiq* yang berhasil penulis wawancarai. Para *mustahiq* berharap program ini akan lebih bagus dan berhasil lagi demi mewujudkan kesejahteraan umat dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia umumnya dan Yogyakarta khususnya. Bapak Galih (*mustahiq* mazakki celluler) memaparkan sarannya sebagai berikut:

“Sarannya lebih disesuaikan lagi sama minatnya. Jadi tidak diarahkan dan ditentukan. Kemarin kan Cuma diarahkan tiga usaha: gorengan, angkringan sama celluler. Kalo kita diberi kebebasan untuk memilih, walaupun dengan modal yang sama mungkin lebih efektif. Penurunan dananya sudah betul tidak dalam bentuk uang (berupa sarana & peralatan. Jadi dengan kebebasan ini kita megajukan usaha yang sekiranya bisa tercapai dengan modal yang sudah ditentukan. Agar tidak salah sasaran.”

Selanjutnya, dari kualitas sarana dan peralatan, Ibu Sri Suyati (*mustahiq* angkringan mazakki) memberikan sarannya sebagai berikut:

“Peralatan kedepannya lebih bagus dan lebih kuat. Kemarin kena angin hujan rusak. Pernah juga gerobak saya nabrak ketika di booking pesanan acara, pas di depan nabrak gapura. Rusak.”

Program Jogja Sejahtera ini dimonitoring selama satu tahun berjalan. Monitoring laporannya, pendampingannya, setoran tabungannya dan monitoring ketentuan lainnya. Setelah satu tahun, *mustahiq* sudah dipersilahkan untuk berdagang secara mandiri dengan semua gerobak dan peralatan sudah menjadi hak milik *mustahiq*. Namun tetap Baznas dan para *mustahiq* ada komunitas untuk tetap menjaga silaturahmi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisa penulis yang tertuang dalam hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa peran zakat produktif terhadap pencapaian SDGs dalam mengentaskan kemiskinan di Baznas Kota Yogyakarta itu sangat besar pengaruhnya. Hal ini dibuktikan dengan fakta lapangan yang penulis temui dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staff-staff pelaksana bidang *pentasharufan* dan *mustahiq* zakat produktif di Baznas Kota Yogyakarta. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi produktif dalam program Jogja Sejahtera di tiga bidang usaha mazakki ini juga dibuktikan dengan keberhasilan seorang *mustahiq* yang sudah bisa dan mampu untuk berqurban pada Idul Adha tahun 2018 ini.

Selanjutnya, lima program unggulan Baznas di tahun 2017 yang salah satunya adalah program Jogja Sejahtera dengan 80 orang penerima manfaat/*mustahiq*. Alur pemberian modal usaha zakat produktif adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi
2. Pendaftaran dan Cek Kelengkapan Dokumen
3. Tinjauan Lapangan
4. Pengumuman

5. Pembinaan Usaha (Sekolah Saudagar)
6. MoU/Tanda Tangan Kesepakatan
7. Penerjunan Dana
8. Pendampingan Selama Program Berjalan

Saran yang dapat disampaikan terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Untuk lembaga Baznas Kota Yogyakarta, diharapkan laporan keuangan lebih disajikan dengan rapih dan jelas.
2. Perlu adanya edukasi pelatihan kerja kepada staff relawan agar memiliki kemampuan kerja yang baik.
3. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya menggali informasi tidak hanya kepada pelaksana saja namun kepada pimpinan juga agar informasi yang didapat lebih lengkap dan kredibel. Bahkan kepada para penerima manfaat/*mustahiq* jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beik, Irfan Syauqi. (2008). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. Vol. 2.
- BPS. (2018). Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta. www.yogyakarta.bps.go.id. diakses pada tanggal 29 Maret 2018, 00.03 WIB.
- Budi, Teddy Tri Setio. (2017). Peneliti: 90 Persen Warga Miskin ASEAN Tinggal di Indonesia dan Filipina. www.liputan6.com. diakses pada tanggal 29 Maret 2018, 01.55 WIB.
- Destrianita. (2017). Maret 2017, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 27,77 Juta. www.tempo.co. diakses pada tanggal 27 Februari 2018, 13:18 WIB.
- Hoelman, M,B, Bona Tua Parlinggoman Parhusip, Sutoro Eko, Sugeng Bahagijo, Hamong Santono. (2015). *Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Jakarta: Infid.
- Intan, Novita. (2017). Baznas: Potensi Zakat di Indonesia sangat besar. www.republika.co.id. diakses pada tanggal 13 April 2018, 00.41 WIB.
- Pratama, Yoghi Citra. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*. Vol. 1, No. 1: 93-104.

- Rosmawati, Rosi. (2014). Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *PadjadjaranJurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 1: 175-191.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaiful dan Suwarno. (2015). Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (*Mustahiq*) pada Lazismu PDM di Kabupaten Gresik. *BENEFIT Jurnal Managemen dan Bisnis*. Vol. 19, No. 2: 150-160.